



Model Komunikasi Humas Pemerintah Nagari (Studi pada Nagari III Koto Aur Malintang sebagai Nagari Berprestasi Informatif di Provinsi Sumatera Barat)

Ilham Havifi¹⁾; Revi Marta²⁾; Lusi Puspika Sari³⁾

¹⁾ Department of Communication Science, Faculty of Social and Political Science, Andalas University

²⁾ Department of Communication Science, Faculty of Social and Political Science, Andalas University

³⁾ Department of Political Science, Faculty of Social and Political Science, Andalas University

Email: ¹⁾ ilhamhavifi@gmail.com; ²⁾ unirevi@gmail.com; ³⁾ lusipuspikasari@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received 10 Mei 2023]

Revised [28 Mei 2023]

Accepted [21 Juni 2023]

KEYWORDS

Model Komunikasi, Humas
Pemerintah, Nagari

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik menjadi jembatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah Desa dan Nagari untuk peninjauan pembangunan. Bahkan Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berhasil meraih penghargaan berprestasi "Informatif" dari Komisi Informasi Sumatera Barat yang mengemas komunikasi Nagari kepada Masyarakat dari seluruh Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemetaan model komunikasi di Nagari III Koto Aur Malintang penting untuk dilihat karena pemerintahan Nagari ini memiliki struktural Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) atau yang biasa dikenal dengan Humas Pemerintah. Humas Pemerintah ini mengelola roda aspirasi masyarakat di Nagari sehingga berperan atas kemajuan Nagari. Model komunikasi Humas Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang ini dipelajari secara detil proses, karakteristik, *power relations* dengan perspektif komunikasi pemerintahnya. analisis penelitian dimulai dengan memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi humas pemerintah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik di Nagari III Koto Aur Malintang Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. subjek penelitian adalah Pejabat Humas Pemerintah di Nagari III Koto Aur Malintang, Wali Nagari, praktisi media, dan pemangku kepentingan yang mewakilkan masyarakat Nagari. Hasil penelitian melihat model komunikasi humas pemerintah memiliki peran dalam pembangunan hubungan fungsional dengan publik melalui kerjasama dengan pemangku adat bersama anak Nagari dalam rangka publikasi kegiatan Nagari III Koto Aur Malintang sehingga menunjang pemerataan pembangunan di Nagari.

ABSTRACT

Openness of public information is a bridge for the regional government of West Sumatra Province with the Village and Nagari governments for development reviews. Even Nagari III Koto Aur Malintang, Padang Pariaman Regency, West Sumatra Province, won an "Informative" achievement award from the West Sumatra Information Commission which packaged Nagari's communications to the public from all regions of West Sumatra Province. Role Communication mapping in Nagari III Koto Aur Malintang is important to look at because the Nagari Government has a Public Information Management Officer (PPID) structure or commonly known as Government Public Relations. Government Public Relations manages the aspirations of the people in the Nagari so that it plays a role in the progress of the Nagari. The Nagari Government Public Relations communication model is studied in detail about the process, characteristics, power relations with the government's communication perspective. This research analysis begins with mapping the problems faced by government public relations as an Information Management and Documentation Officer functioning as a manager and transmitter of documents owned by public bodies in accordance with the mandate of Law 14/2008 concerning public information disclosure in Nagari Iii Koto Aur Malintang, West Sumatra Province. The method used in this study is a qualitative approach with a constructivism paradigm. research subjects were Government Public Relations Officers in Nagari III Koto Aur Malintang, Wali Nagari, media practitioners, and stakeholders representing the Nagari community. The results of the study show that the government's public relations communication model has a role in developing functional relationships with the public through collaboration with customary stakeholders with Nagari children in the context of publishing Nagari III Koto Aur Malintang activities so as to support equitable development in Nagari.

PENDAHULUAN

Komunikasi dapat menjadi solusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah yang sedang dihadapkan dengan berbagai kasus ditengah Pro-Kontra kebijakan di tingkat

Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Ketimpangan pembangunan dan tidak meratanya pembangunan masyarakat menjadi sumber permasalahan utama yang dihadapkan Pemerintah saat ini. Resiko kegagalan komunikasi dalam (Liu, 2021) dapat memperburuk pandangan masyarakat terhadap proses pembangunan ini, terutama pada masyarakat daerah yang dalam hal ini pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Resiko kegagalan komunikasi dapat memperburuk pandangan masyarakat dari berbagai dampak kebijakan diambil pemerintah dalam pengelolaan masyarakatat desa yang dalam penelitian ini melihat Desa di Provinsi Sumatera Barat yang secara administratif disebut Nagari. Berbagai informasi tidak bisa dikontrol apabila instansi Pemerintah dan Nagari III Koto Aur Malintang tidak dapat meng-*counter* pengelolaan informasi yang beredar di masyarakat atas pelayanan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat nagari dari hal positif sampai hal negatif. Disinilah peran humas Pemerintah dan Nagari III Koto Aur Malintang perlu memberikan informasi kebijakan dan berbagai program pemerintah Nagari dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat Nagari sehingga program dan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Struktur humas pemerintah yang dimiliki Nagari ini berfungsi membangun citra dan mengelola komunikasi. Dengan komunikasi orang dapat mencapai kesamaan pandangan yang selanjutnya bertransformasi kepada kerjasama yang baik. Oleh sebab itu komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mencapai sukses, yang dalam penelitian ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh humas Pemerintah pada aspek politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui Komunikasi Pemerintah dengan situasi politik daerah yang saat ini cukup menarik untuk diamati dengan kultur Minangkabau dan masyarakat yang dinamis dalam berpolitik tentu upaya Nagari III Koto Aur Malintang Sumatera Barat dalam menghasilkan kinerja yang baik perlu menjadi perhatian.

Komunikasi dapat menjadi solusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah yang sedang dihadapkan dengan berbagai kasus ditengah Pro-Kontra kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah (Husain, 2013). Ketimpangan pembangunan dan tidak meratanya pembangunan masyarakat menjadi sumber permasalahan utama yang dihadapkan Pemerintah saat ini. Resiko kegagalan komunikasi dapat memperburuk pandangan masyarakat terhadap proses pembangunan ini, terutama pada masyarakat daerah yang dalam hal ini pada Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Menariknya, keterbukaan informasi publik menjadi jembatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Desa dan Nagari untuk peninjauan pembangunan, bahkan Nagari III Koto Aur Malintang berhasil meraih prestasi pertama yang mengemas komunikasi Nagari kepada Masyarakat dengan kategori informatif di Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mencapai sukses pembangunan masyarakat nagari untuk menciptakan keterbukaan informasi publik yang baik sehingga terbentuk kesamaan pemahaman dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Nagari.

Pemetaan komunikasi di Nagari III Koto Aur Malintang penting untuk dilihat karena Pemerintah Nagari memiliki Struktural Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) atau yang biasa dikenal dengan Humas Pemerintah. Humas Pemerintah ini mengelola roda aspirasi masyarakat di Nagari sehingga berperan atas kemajuan Nagari. Model komunikasi Humas Pemerintah Nagari ini dipelajari secara detil proses, karakteristik, power relations dengan perspektif komunikasi Pemerintahnya. analisis penelitian ini dimulai dengan memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi humas Pemerintah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik di Nagari III Koto Aur Malintang Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. subjek penelitian adalah Pejabat Humas Pemerintah di Nagari III Koto Aur Malintang, Wali Nagari, praktisi media, dan pemangku kepentingan yang mewakili masyarakat Nagari. Hasil penelitian melihat model komunikasi humas Pemerintah memiliki peran dalam pembangunan hubungan fungsional dengan publik melalui kerjasama dengan pemangku adat Bersama anak Nagari dalam rangka publikasi kegiatan Nagari III Koto Aur Malintang sehingga menunjang pemerataan pembangunan di Nagari.

Dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Pemerintah Nagari Daerah (Nagari III Koto Aur Malintang) Provinsi Sumatera Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. PPID Pembantu Sekretariat Nagari III Koto Aur Malintang Sumatera Barat memperoleh penghargaan predikat "Informatif" dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Hal ini dapat terlihat dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan semua sistem informasi sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informastif atau cukup infomatif bagi semua kalangan.

Dalam konteks penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparatur negara. Ini semakin dirasakan dan penting, karena pelayanan yang baik dan prima akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Sumatera Barat merupakan lembaga



pemerintah yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi Nagari III Koto Aur Malintang. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dari segi fisik saja namun juga dibarengi dengan keberhasilan pembangunan non fisik dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap anggota dewan untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan yang bersifat aspiratif kepada masyarakat. Maka keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat, perlu disampaikan kepada publik.

Dalam penerapannya, Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang meraih prestasi terbaik pertama dalam pengelolaan keterbukaan informasi public sumbar. PPID Sekretariat Nagari III Koto Aur Malintang Provinsi Sumatera Barat berhasil mengemas Informasi yang baik sebagai humas Pemerintah dalam membangun hubungan fungsional dengan Publik secara kelembagaan dengan menjalin kemitraan dengan media massa, cetak, maupun online dalam rangka pembangunan masyarakat di Nagari III Koto Aur Malintang Sumatera Barat. Oleh karena itu, kajian Komunikasi Pemerintah pada humas Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Sumatera Barat dalam penelitian ini diharapkan dapat dipelajari secara detil proses, karakteristik, power relations dengan perspektif ilmu komunikasi, lebih khusus di humas Pemerintahnya. Oleh karena itu, penelitian yang melihat Model Komunikasi Humas Pemerintah Nagari ini bertujuan untuk mengurai proses bagaimana Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang sebagai Nagari Berprestasi Informatif di Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat sebagai salah satu indikator Percepatan Pembangunan nagari sebagai Nagari maju.

LANDASAN TEORI

Humas Pemerintah

Humas (Hubungan Masyarakat) merupakan sebuah fungsi manajemen yang membangun serta menjaga komunikasi antara organisasi/instansi dengan masyarakat. Humas yang baik pada hakikatnya memberikan pengaruh terhadap kesuksesan dan kegagalan organisasi. Humas di dalam pemerintah harus menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat, baik di dalam instansi atau di luar instansi. Kualitas komunikasi ini dapat mempengaruhi suasana kerja (work situation) instansi dimana humas berada (Chatra, 2020). Praktisi humas pemerintah berupaya membentuk nilai-nilai, pemahaman, dan sikap dari masyarakat sejalan dengan pemerintahan. Humas pemerintah memiliki fungsi mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat yang akan berdampak kepada pembentukan citra pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Jefkins (2003) mengenai tujuan dari *Public Relations*, dimana pendapat Jefkins terkait dengan tujuan *public relations* sebelumnya berhubungan dengan aktivitas pengelolaan kehumasan dalam membangun citra dan kinerja pemerintahan. Sehingga fungsi kehumasan dapat terorganisir dengan baik dan tepat (Widjaja, 2002)

Dalam prakteknya, di Indonesia humas pemerintah ini dapat dilihat dari Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang pelaksana keterbukaan Informasi Publik (KIP). Wujud dari UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP menjadi koridor untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas, menjadi penting untuk diimplementasikan oleh semua badan publik dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pengelolanya. Pelayanan Informasi Publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Pelayanan informasi publik dilakukan oleh PPID. Kegiatannya melayani dan memberikan informasi sesuai dengan informasi yang diminta oleh pemohon informasi.

Penghargaan Lembaga Publik dari Komisi Informasi Sumatera Barat

Komisi Informasi Sumatera Barat secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dan pembinaan kepada seluruh badan publik di Provinsi Sumatera Barat. Monev ini merupakan program yang strategis dalam rangka memotret kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Tahun 2022 ini, Komisi Informasi Sumbar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 398 Badan Publik se Sumbar. Dari hasil monev ini disimpulkan bahwa terjadi kenaikan kepatuhan badan publik. Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Sumatera Barat. Dengan peningkatan kualitas ini tentu saja pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, demi terwujudnya masyarakat yang madani (sumbarporv.go.id/2022)

Penghargaan Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi Sumbar, Nagari III Koto Aur Malintang sempat memperoleh keterbukaan informasi di Tahun 2020 dan terkini di Tahun 2022 ini. Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang, kembali menjemput Nagari Informatif terbaik kedua tingkat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Pada tahun ini lembaga publik kategori Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang masuk tiga besar nagari informatif. Penghargaan dari Komisi Informasi Sumbar 2022 ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatra Barat dengan ajang terkahir Desember 2022.

Nagari III Koto Aur Malintang

Konsep Nagari belum terhapus dari pemikiran masyarakat Minangkabau karena dia telah ada sejak abad ke 15 dan dijaga secara turun-temurun oleh masyarakatnya dalam lingkungan mereka. Bisa juga dikatakan bahwa sistem ini belum mampu digantikan oleh sistem negara bangsa yang terbentuk pasca penjajahan. Dalam penelitian ini diperlihatkan bagaimana pandangan masyarakat Minangkabau tentang Nagari sebagai simbol politik mereka secara tidak langsung yang dapat ditangkap dari pemaknaan mereka terhadap nagari. Nagari III Koto Aur Malintang, merupakan salah satu Nagari di Provinsi Sumatera Barat dengan gambaran geografis sebagai salah satu Nagari di Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan pusat pemerintahan Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Pada Tahun 2011 yang lalu Nagari ini dimekarkan menjadi empat Nagari yaitu Nagari III Koto Aur Malintang dengan pusat pemerintahan di Batu Basa Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan pusat pemerintahan di Aur Malintang, Nagari III Koto Aur Malintang Utara dengan pusat pemerintahan di Padang Lariang dan Nagari III Koto Aur Malintang Timur dengan pusat pemerintahan di Durian Jantung. (nagari3kotoamal.id)

Model Komunikasi

Model komunikasi merupakan alat untuk menjelaskan atau untuk mempermudah penjelasan komunikasi. Dalam pandangan Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Oleh karena itu model bisa disebut sebagai gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori atau penyederhanaan teori. Fungsi model komunikasi paling tidak bisa melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kendala komunikasi dalam perspektif teoritik. Komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Kegiatan komunikasi *Public Relations* pada umumnya menggunakan teori J. Grunig and Hunt sebagai pedoman bagi para pelaku public relation terutama untuk menerapkan hubungan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses public relation (Ruslan, 2011). Model ini lebih mengutamakan cara seorang *Public Relations* berhubungan dengan publik internal maupun eksternalnya. Seorang PR harus selalu menjaga citra positif instansi/Lembaga/perusahaan dimanapun ia berada melalui berbagai cara/teknik pendekatan menggunakan berbagai media. Menurut Grunig (2002) *public relation* dalam konsep dan praktik dalam proses komunikasi yaitu terdapat 4 model: (1) *Model-Publicity or Press Agency* atau yang disebut dengan press agency model (keagenan pers atau model propaganda), (2) *Model-Public Information* yang merupakan public information model (model informasi publik), (3) *Model-Two Way Asymmetrical* model dengan asimetris dua arah), dan (4) *Model-Two Way Symmetrical* model simetris dua arah. (Ruslan 2008:103).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Pendekatan yang digunakan untuk melihat model komunikasi humas pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang adalah dengan analisis Konten Kualitatif karena peneliti lebih tertarik pada makna terkait dengan pesan daripada dengan berapa kali variabel pesan terjadi. Dalam analisis isi dikenal tiga pendekatan: deskripsi, eksplanatif dan prediktif. Kajian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan deskripsi aspek-aspek ataupun karakter suatu pesan atau teks (Eryanto, 2011), bukan untuk mencari hubungan ataupun menguji hipotesa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis induktif yang berpotensi mengembangkan kategori-kategori ke dalam sebuah model atau kerangka dengan meringkas data mentah yang kompleks. Analisa secara induktif merupakan prosedur untuk menemukan konsep, tema, ataupun model berdasarkan interpretasi analisis ataupun peneliti melalui pembacaan yang detail terhadap teks.

Peneliti penting menetapkan waktu dan lokasi penelitian untuk mencapai target dari penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 hingga Desember 2022. Penelitian ini merupakan penelitian berkelanjutan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian dilaksanakan di Nagari yang memperoleh penghargaan dan prestasi dengan kategori "Informatif" dari Komisi Informasi Sumatera Barat, yakni di Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, terkhusus pada humas pemerintah pada struktur pemerintahan Nagari tersebut. Pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu: Pertama, melakukan observasi langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari humas politik dalam mengelola keterbukaan informasi dan publikasi pelaksanaan tugas tugas dari pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Sumatera Barat. Kedua, Melakukan tanya jawab lisan secara langsung dengan responden penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan. Ketiga,



mengumpulkan data dengan cara penelusuran dan pencatatan data, dokumen, arsip, maupun referensi yang relevan dengan model komunikasi humas pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Penelitian yang melihat Model Komunikasi Humas Pemerintah Nagari ini bertujuan untuk mengurai proses bagaimana Pemerintah Nagari III Koto Aua Malintang sebagai Nagari Berprestasi Informatif pada tahun 2022 dalam ajang yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan kategori "Informatif" yang terurai dalam memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat sebagai salah satu indikator Percepatan Pembangunan nagari sebagai Nagari mandiri. Humas pemerintah di Nagari ini sangat berperan dalam menciptakan informasi yang terbuka kepada masyarakat nagari mengenai berbagai aktifitas kegiatan pemerintah nagari seperti menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari sebagai tugas utama dari pemerintah nagari. Bahkan dalam rancangan dana, tahapan penggunaan dana, dan penggunaan dana Nagari tertuang pada media informasi yang digunakan Nagari III Koto Aua Malintang untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat manapun tanpa Batasan akses publik, seperti website, media sosial serupa facebook, Instagram, sampai media baru yang tergolong baru yakni Tiktok.

Melihat dari struktur organisasi di Nagari III Koto Aur Malintang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai bagian struktur Pemerintahannya dalam membantu tugas Wali Nagari selaku pimpinan Nagari. Hal yang sangat berbeda dari Nagari-Nagari lainnya yang lebih fokus pada manajemen administratif pemerintah dalam aktifitas pelayanan publik yakni masyarakat Nagari. Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang memiliki bagian yang dapat mendorong terciptanya Informasi publik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengikuti dengan baik setiap proses berkembangnya Nagari yang memiliki kemandirian yang baik. Diurai melalui model komunikasi humas pemerintah yang dilakukan PPID Nagari, penelitian ini menekankan aktifitas humas nagari dapat berperan sebagai salah satu indikator percepatan dengan membangun informasi yang terbuka kepada masyarakat.

Model komunikasi humas pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Sumatera Barat dalam penerapan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Nagari

1. Model *Publicity-Press Agency*

Model komunikasi ini, Humas Nagari III Koto Aur Malintang melakukan kampanye melalui proses komunikasi searah (*one way process*) untuk tujuan publisitas informasi yang lebih condong ke pemerintah nagari sebagai penyamai informasi utama, khususnya informasi umum untuk masyarakat Nagari, media massa untuk meminimalisir (manipulasi) unsur-unsur negatif yang timbul dari aktifitas pemerintahan (organisasi). Inisiatif selalu berada di Wali Nagari dan PPID selaku pengirim informasi (*source or sender*), dan termasuk model ini dimanfaatkan dalam proses komunikasi periklanan seperti iklan layanan masyarakat dari nagari mengenai info kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan berbagai bentuk aktivitas komunikasi yang dilakukan pemerintah Nagari untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.



Gambar 1. Tampilan Laman Website Nagari III Koto Aur Malintang.
Sumber: Olahan Penulis, 2023

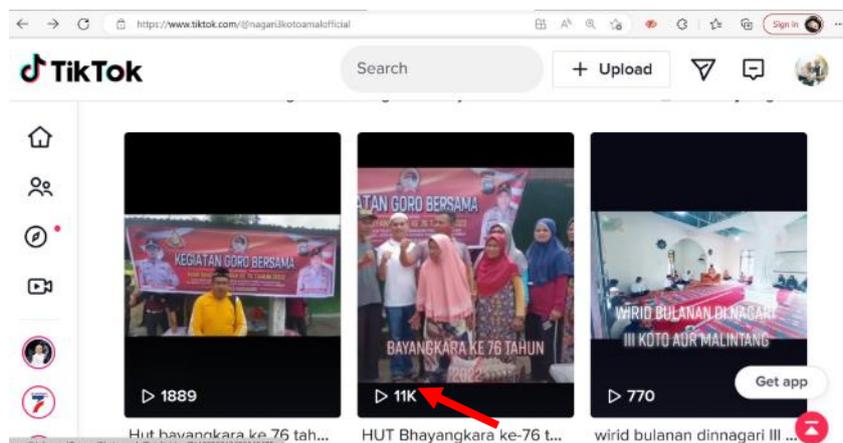
Hal ini dapat dilihat dari website Nagari III Koto Aur Malintang (<http://www.nagari3kotoamal.id/>) yang pada laman utama-nya menampilkan profil nagari dan korongnya, lalu struktur lembaga, organisasi, kader, relawan, berbagai badan usaha nagari. Lalu tersedia secara khusus bagian informasi website dari aktifitas humas pemerintah nagari yakni memberikan informasi kepada masyarakat berupa PPID nagari, zona integritas, jadwal pelayanan informasi, alur mekanisme permohonan publik, hak pemohon informasi publik, alur mekanisme layanan keberatan informasi publik, sengketa informasi publik, daftar informasi publik, daftar informasi yang dikecualikan, formulir, regulasi informasi publik, katalog, dan laporan-laporan PPID. Selain itu, website nagari menyediakan menu pelayanan nagari, informasi publik, potensi, kegiatan PKK, bantuan untuk masyarakat, warta nagari, prestasi, peta nagari, kerjasama nagari, prosedur peringatan dini dan keadaan darurat, SOP pemerintahan dan statistik nagari. Hal yang lebih menarik juga terdapat informasi smart nagari pada website berupa layanan online, sipena online, CCTV Nagari, *streaming* nagari.

2. Model Public Information

PPID sebagai Humas Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang pada model komunikasi humas pemerintah ini bertindak seolah-olah sebagai *Journalist in resident*. Berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari melalui proses komunikasi searah (*one way process*) dan tidak mementingkan persuasif dalam memberikan informasi publik. Seolah-olah bertindak sebagai wartawan dalam menyebarkan publikitas, informasi dan berita ke publik. Disini humas pemerintah menggunakan media sosial sebagai media informasi-nya, hal ini seperti yang dikatakan Ibu Etriyanti selaku PPID Nagari III Koto Aur Malintang:

“Selama ini masyarakat nagari sangat banyak menggunakan media sosial meskipun begitu informasi tentang nagari kurang didapat masyarakat. Segala informasi terkait nagari disampaikan lewat PPID yang disajikan melalui konten kreatif di media sosial, sehingga menarik perhatian masyarakat” (Wawancara dengan Etriyanti, 5 Mei 2023)

Ada beberapa media sosial yang digunakan Nagari III Koto Aur Malintang seperti Facebook, Instagram, Tiktok dengan nama akun [@nagari3kotoamalofficial](#). Di samping itu, melalui media sosial PPID mampu mengendalikan berita sesuai kebutuhan pemerintah nagari dan mudah dipahami masyarakat yang tertuang melalui konten-konten informasi seolahnya sebuah informasi dari media massa. Unsur kebenaran dan objektivitas pesan (informasi) selalu diperhatikan PPID dalam menyajikan informasi karena konten informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih banyak terkait aktifitas pemerintah Bersama masyarakat dalam membangun nagari.



Gambar 2. Tampilan Konten Tiktok Nagari III Koto Aur Malintang, 11 Ribu Like.

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Hal ini dapat dilihat dari salah satu konten informasi yang dibuat oleh PPID Nagari yang menginformasikan mengenai peringatan Hut Bhayangkara ke-76 tahun 2022 di Nagari III Koto Aur Malintang yang diposting pada tanggal 18 Juni 2022 dan mendapat respon tinggi dari masyarakat dengan 11 ribu like (penyuka) di Tiktok Nagari III Koto Aur Malintang yang menggambarkan informasi yang diberikan kepada masyarakat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.



3. Model Two Way Asymmetrical

Model komunikasi humas pemerintah di Nagari III Koto Aur Malintang melakukan aktifitas program “kampanye” melalui komunikasi dua arah, dan penyampaian pesan-pesan berdasarkan hasil riset serta strategi komunikasi persuasif publik secara ilmiah (*scientific persuasive*). Unsur kebenaran informasi diperhatikan untuk membujuk publik agar mau bekerja sama, bersikap terbuka sesuai harapan pemerintah nagari beserta program pemerintah untuk pelayanan public nagari. Dalam model ini masalah *feedback* dan *feed forward* dari pihak masyarakat sebagai publik pemerintah nagari diperhatikan, serta berkaitan dengan informasi mengenai khalayak diperlukan sebelum melaksanakan komunikasi. Komunikasi yang dibangun PPID melalui model ini digambarkan dalam pengelolaan pembangunan masyarakat yang sebelumnya sudah dipetakan kondisi aktualnya. Salah satu-nya kondisi Pendidikan di nagari, wali nagari menyampaikan informasi melalui program “setiap rumah dan kartu keluarga untuk memiliki 1 sarjana” untuk pembangunan kualitas hidup masyarakat. Azwar selaku Wali Nagari Program mengatakan:

“Salah satu program kepemimpinan yang dilaksanakan seperti program 1 KK (Kartu Keluarga) 1 Sarjana. Jadi kami membangun Kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi terutama di Sumatera Barat untuk memastikan pemuda Nagari dapat melanjutkan Pendidikan dan meraih sarjana sehingga memiliki daya saing dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Nagari yang mandiri”. (Wawancara dengan Azwar, 26 September 2022)

Aktifitas komunikasi humas pemerintah dalam model ini sangat tergambar dari salah satu program Wali Nagari dengan melakukan banyak “Kerjasama” dengan Perguruan Tinggi untuk peningkatan Pemuda di Nagari, selain itu bentuk Kerjasama juga diinformasikan melalui laman website Nagari. Tidak hanya itu, disektor ekonomi, PPID selaku humas Nagari juga melakukan pemantauan perkembangan BumNag (Badan Usaha Milik Nagari) yang ini terlihat dari ada-nya pemantauan perkembangan BumNag dengan diinformasikannya Laporan Neraca BumNag pada website Nagari III Koto Aur Malintang bagian menu pemerintahan yang mengesakan ini model *Two Ways Asymmetrical* yang dilakukan humas pemerintah nagari. Disini kekuatan, membangun hubungan (*relationship*) dan pengambilan inisiatif selalu didominasi oleh pemerintah nagari (*sources*) untuk memantau dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nagari yang mandiri.

4. Model Two Way Symmetrical

Model komunikasi yang dilakukan humas pemerintah di Nagari III Koto Aur Malintang digambarkan dalam bentuk simetris dua arah. Komunikasi dilakukan dalam bentuk propaganda (kampanye) melalui dua arah timbal balik yang berimbang, seperti Musrebang dan berfungsinya Lembaga Masyarakat Nagari, seperti Bamus (Badan Permusyawaratan Nagari), KAN (Kerapatan Adat Nagari), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan TP-PKK (Tim Penggerak PKK) yang SK pembentukan diinformasikan di laman website Nagari bagian menu pemerintahan. Model ini mampu memecahkan atau menghindari terjadinya suatu konflik dengan memperbaiki pemahaman publik secara strategis agar dapat diterima, dan dianggap lebih etis dalam penyampaian pesan-pesan (informasi) melalui teknik komunikasi membujuk (*persuasive communication*) untuk membangun saling pengertian, dukungan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Model-model komunikasi di atas, bagi PR dipergunakan dengan model yang berbeda untuk tujuan berbeda dan dalam situasi yang berbeda pula secara tepat serta efektif, baik untuk tujuan penelitian maupun kegiatan secara praktikal. Musyawarah dan Mufakat sangat berperan penting disini, misalnya saja pengelolaan Anggaran Nagari dilakukan melalui musyawarah dan seluruh struktur lapisan masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pengelolannya. Menariknya lagi, model ini humas pemerintah nagari juga memanfaatkan ruang publik yang dimiliki Nagari III Koto Aur Malintang, salah satu-nya melalui lapau nagari. Azwar selaku Wali Nagari III Koto Aur Malintang mengatakan:

“Semua program Nagari dan berbagai permasalahan juga dibahas di lapau-lapau nagari. Masyarakat dapat memperoleh dan bertukar informasi terbaru mengenai keberlangsungan nagari. Informasi pekerjaan, politik, ekonomi, sosial, budaya dikumpas tuntas di lapau. Masyarakat nagari sangat gemar ke lapau” (Wawancara dengan Azwar, 8 Oktober 2022)

Lapau dalam (Havifi, 2023) dikenal tidak hanya warung kopi saja bagi masyarakat Minangkabau, tetapi juga sebagai ruang pendidikan sebagai tempat ajang bertukar pikiran masyarakat yang disuguhi tempat minum kopi dan pembeli minuman kopi bertemu. Jadi, lapau di Nagari III Koto Aur Malintang

berperan bukan hanya sekedar mendapatkan segelas kopi untuk diminum, akan tetapi juga sebagai suatu media interaksi antara sesama pengunjung. Lapau digunakan pemerintah nagari menjadi ruang bagi masyarakat yang dapat dinikmati, ditempati oleh siapa saja, sehingga fungsi tersebut membuat kedai kopi menjadi sarana komunikasi dan tempat berdiskusi, menyamakan pemikiran dan pemahaman, dan sarana sosialisasi pemerintah nagari sehingga model komunikasi Humas pemerintah Nagari “*Two Ways Symmetrical*” berlangsung efektif melalui musyawarah dan diskusi melalui ruang public nagari.

Humas Nagari sebagai salah satu indikator Percepatan Pembangunan Nagari dengan memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat melalui Model komunikasi yang dilakukan PPID Nagari

Humas Pemerintah saat ini tidak hanya berada pada komposisi pemerintahan yang berada dipusat masyarakat Ibu Kota saja. Melalui penelitian ini membuktikan bahwa humas pemerintah juga lahir dan sangat berperan di pemerintahan daerah yang terdapat pada struktur daerah paling bawah. Pemerintahan daerah di Desa yang dalam penelitian ini di daerah Desa atau Nagari. Humas Nagari diadopsi dari penerapan tugas, fungsi, aktifitas yang dilakukan oleh Humas Daerah sebagaimana yang diungkapkan oleh Kriyantono, (2021: 162) dalam Buku Humas Pemerintahnya, tugas humas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Permenkominfo No.14 Tahun 2016 Humas Daerah bertugas merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi kebijakan, dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan, Menyusun norma, standar, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dalam pengelolaan opini dan aspirasi public, pengelolaan informasi, penyedia konten, pelayanan informasi public, layanan infrastruktur, layanan manajemen data, integrasi layanan publik, layanan keamanan informasi, layanan sistem komunikasi, layanan pengembangan berbasis aplikasi, penyelenggara ekosistem TIK, layanan nama domain Lembaga, penyelenggara *Government Chief Informations*, dan pengembangan sumber daya TIK.

Peranan Humas pemerintah disini menjabarkan bagaimana posisi penting yang dilahirkan oleh Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang di dalam struktur organisasinya yakni PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dimana bekerja sebagai menyampai semua informasi yang dilakukan pemerintah nagari untuk kemajuan masyarakat nagari. Upaya-upaya yang dilakukan PPID ini sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Ibu Etriyanti selaku PPID Nagari III Koto Aur Malintang bahwa:

“PPID di pemerintahan nagari III Koto Aur Malintang berperan untuk memberikan kemudahan dan transparansi dana Nagari kepada Masyarakat. PPID mengelola informasi seputar pemerintahan dan pemerdayaan masyarakat, kesenian dan postingan hampir seluruh aktifitas nagari” (Wawancara dengan Etriyanti, 5 Mei 2023)

Hal inilah yang menggambarkan peran penting PPID di Nagari III Koto Aur Malintang merupakan salah satu Nagari di Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan merupakan pusat pemerintahan Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman yang secara Geografis Nagari ini lebih dekat dengan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil penelitian, untuk mengunjungi Nagari III Koto Aur Malintang bisa dikatakan harus menempuh perjalanan yang cukup menantang namun seketika usaha menuju perjalanan dibayar lunas Ketika sampai di nagari yang disambut dengan tata nagari yang cukup baik, terutama dari semua media informasi yang dimanfaatkan dengan baik, seperti baliho dan billboard digital informasi terkait nagari. Adanya Kerjasama dan koordinasi yang baik dari setiap struktur pemerintahan mendukung peranan PPID sesuai yang dikatakan PPID Nagari III Koto Aur Malintang bahwa:

“Awalnya ada kolaborasi dengan Capil kabupaten dan kemudian kolaborasi dengan organisasi di nagari sebagai pendukung sehingga mendapatkan respon yang baik” (Wawancara dengan Etriyanti, 5 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan tingkat intensitas pemerintah Nagari berkomunikasi dengan masyarakat sangat baik yang membawa nagari ini berprestasi Keterbukaan informasi publik Sumatera Barat. Kantor pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang, disuguhkan dengan tata ruang kantor yang sangat informatif dengan nada nya mesin pelayanan yang dapat diakses secara digital bahkan bisa digunakan dihari libur kerja. Adanya papan informasi alur dan prosedur untuk memperoleh pelayanan publik yang sangat mudah dipahami masyarakat dari segala lini usia. Terkait dengan kondisi nagari yang dapat dikatakan sangat informatif terutama dari komisi informasi Sumatera Barat, tentu dibutuhkan Pemerintahan Nagari yang profesional yang bisa menggali dan mengelola berbagai potensi yang ada serta bisa mengayomi semua pemangku kepentingan di Nagari. Peran sentral Pemerintahan Nagari salah satunya terletak pada peran Wali Nagari dan dilahirkannya PPID sehingga Humas pemerintah di nagari sangat berperan dengan baik membuat keberhasilan Nagari sebagai wilayah yang otonom menjadi maju dan sejahtera.



Melihat upaya-upaya komunikasi yang dilakukan PPID selaku Humas Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang dalam penerapan keterbukaan informasi melalui model komunikasi yang sudah tergambarkan sebelumnya, dapat dijadikan model acuan dan pedoman yang digunakan nagari untuk kemajuan masyarakat dalam nagari yang mandiri. Model komunikasi humas pemerintah di Nagari III koto Aur Malintang ini dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan atau untuk mempermudah penjelasan komunikasi pemerintah nagari kepada masyarakat nagari. Model komunikasi humas pemerintah ini disebut sebagai gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori atau penyederhanaan teori. Fungsi model komunikasi humas pemerintah ini melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kendala komunikasi sehingga informasi yang disampaikan pemerintah nagari dapat berjalan dengan baik, terbuka, dan sangat mudah dipahami masyarakat.

Proses komunikasi yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan pemerintah nagari dengan masyarakat secara umum, kelompok nagari seperti Bamus (Badan Musyawarah Nagari), Pemangku Adat, Pemuda Nagari, sehingga dapat yang respon dan menciptakan pesan yang sangat adaptif dengan kondisi masyarakat terkini melalui berbagai media komunikasi efektif baik secara langsung maupun melalui media baru, Tiktok Nagari (@nagari3kotoamalofficial). Disinilah peran Humas Nagari sebagai salah satu indikator Percepatan Pembangunan Nagari dalam memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat melalui Model komunikasi yang dilakukan PPID Nagari III Koto Aur Malintang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model komunikasi Humas Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang ini dipelajari secara detil proses, karakteristik, power relations dengan perspektif komunikasi pemerintahnya. analisis penelitian dimulai dengan memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi humas pemerintah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik di Nagari III Koto Aur Malintang Provinsi Sumatera Barat.. Penelitian yang melihat Model Komunikasi Humas Pemerintah Nagari ini bertujuan untuk mengurai proses bagaimana Pemerintah Nagari III Koto Aua Malintang sebagai Nagari Berprestasi Informatif pada tahun 2022 dalam ajang yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan kategori "Informatif" yang terurai melalui model komunikasi humas pemerintah yang dilakukan PPID Nagari, penelitian ini menekankan aktifitas humas nagari dapat berperan sebagai salah satu indikator percepatan dengan membangun informasi yang terbuka kepada masyarakat nagari melalui 4 model komunikasi humas pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang, yakni: (1) *Model-Publicity or Press Agency* (2) *Model-Public Information* (3) *Model-Two Way Asymmetrical*, dan (4) *Model-Two Way Symmetrical*.

Humas Nagari sebagai salah satu indikator Percepatan Pembangunan Nagari dengan memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat melalui Model komunikasi yang dilakukan PPID Nagari melalui Model komunikasi humas pemerintah di Nagari III koto Aur Malintang ini dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan atau untuk mempermudah penjelasan komunikasi pemerintah nagari kepada masyarakat nagari. Dengan melihat upaya-upaya komunikasi yang dilakukan PPID selaku Humas Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang dalam penerapan keterbukaan informasi melalui model komunikasi yang sudah tergambarkan sebelumnya, dapat dijadikan model acuan dan pedoman yang digunakan nagari untuk kemajuan masyarakat dalam nagari yang mandiri.

Saran

Bagi Pemerintah Nagari, menghadirkan PPID dalam struktur pemerintahan sangat berperan menjadikan nagari III Koto Aur Malintang menjadi nagari mandiri. PPID harus diberi ruang yang lebih interaktif dalam menyajikan data, sehingga informasi yang diberikan melalui model komunikasi humas pemerintah yang cukup efektif kepada masyarakat dapat selalu baru (*up to date*).

PPID selaku humas pemerintah nagari, agar lebih kreatif menyajikan data informasi kepada masyarakat melalui konten-konten informasi kreatif yang disajikan melalui website, media sosial, dan media ruang publik masyarakat nagari sehingga masyarakat dengan mudah memahami informasi yang beriringan dengan cepatnya transisi masyarakat menjadi lebih maju di nagari yang kuat dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Chatra, Emeraldy. Diego. Havifi, Ilham. (2020). Posisi Humas Pemerintah dalam Krisis Komunikasi Akibat Perusakan KWBT Mandeh. *Jurnal Professional FIS UNIVED* Vol.7 No.2 Desember 2020

- Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jefkins (2003 : 54)
- Grunig, L. A., Grunig, J.E., Dozier, David M. 2002. Excellent Public Relations and Effective Organizations, A Study of Communication Management in Three Countries. New Jersey – London: El Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
- Husain, Z. (2013). 'Effective communication brings successful organizational change'. *The Business & Management Review*, ol.3 Number-2, January
- Kriyantono, R. (2021). Best Practice Humas (Public Relations) Bisnis Dan Pemerintah: Manajemen Humas, Teknik Produksi Media Publisitas dan Public Relations Writing Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Liu, B. F. dan Levenshus A. B. 2012. 'Crisis Public Relations for Government Communicators' dalam Lee, M.,Neeley G., Stewart K.. *The Practice of Government Public Relations*. Boca Raton – New York: CRC Press
- Rosady, Ruslan. (2011). Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rosady, Ruslan. (2003). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Bandung : Raja Grafindo Persada
- Reklam AB, Jupiter. 2008. *Crisis Communications Handbook*. Huskvarna: Swedish Emergency Management Agency (SEMA)
- Widjaja , H. A. W., 2002 . Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat), Jakarta: Bumi Aksara